

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Janji Keterbukaan Anggaran Tertunda

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sempat dijanjikan diunggah di situs apbd.jakarta.id setelah disepakati Pemprov dan DPRD DKI. Akan tetapi, janji itu masih tertunda.

JAKARTA, KOMPAS — Penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI, Kamis (28/11/2019) siang. Hingga Kamis malam, dokumen anggaran belum juga diunggah.

Selama rapat, setiap perubahan anggaran langsung dimasukkan dalam catatan digital. Semestinya, proses pengunggahan ke situs publik tidak membutuhkan banyak waktu.

Setelah menandatangani nota kesepahaman (MOU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anies mengatakan, rencana anggaran DKI 2020 akan diunggah setelah proses memasukkan data (*data entry*). "Sekarang *data entry* dimulai, setelah MOU," katanya singkat.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Suharti menjanjikan dokumen anggaran baru diunggah Senin (2/12) setelah komponen-komponennya dimasukkan.

"Besarnya sudah ditentukan kemarin (Rabu) secara global, tetapi semuanya, kan, harus menyesuaikan lagi. Kami menyesuaikan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Senin sudah siap," katanya.

Senin pekan depan, KUA-PPAS yang berisi dokumen itu menurut rencana diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Proses selanjutnya adalah persetujuan dewan terhadap dokumen sebagai rancangan APBD DKI 2020.

Pada 11 Desember, rancang-

an APBD ditargetkan disahkan untuk diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Saefullah dan mantan Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Wirawan menjanjikan dokumen anggaran segera diunggah setelah disepakati sebagai KUA-PPAS. "Setelah (rancangan KUA-PPAS) sepakat (dalam rapat Badan Anggaran), sistemnya kami buka," kata Saefullah, Minggu (10/11).

Partisipasi warga

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, penganggaran harus terbuka dan transparan untuk umum.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan, transparansi rencana anggaran justru sangat penting saat waktu pembahasan begitu mepet seperti dialami DKI sekarang.

Semakin lama waktu rencana anggaran itu dibuka, semakin besar warga bisa turut mengkritisi dan berpartisipasi dalam pengawasan anggaran. Akses publik idealnya dibuka saat warga masih bisa turut bersuara untuk mengubah anggaran.

Dengan waktu yang begitu dekat, tetapi akses publik belum juga dibuka seperti sekarang, kesempatan warga untuk turut bersuara kian kecil. Saat APBD sudah disahkan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam penganggaran sudah tertutup.

Sebenarnya tidak ada aturan pemerintah daerah membuka akses publik terhadap KUA-PPAS. "(Pada pemerintahan) sebelumnya, semua perubahan rencana anggaran dibu-

ka ke publik. Memang ini bukan keharusan, tetapi keterbukaan itu dulu merupakan sebuah inovasi yang sekarang justru turun," kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Dewi Angraini.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa informasi keuangan daerah harus mudah diakses masyarakat.

Peraturan Gubernur DKI No 175/2015 tentang Layanan Informasi Publik juga mewajibkan akses publik terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tengah dalam proses pembuatan.

Di tengah kritik turunnya keterbukaan proses anggaran itu, Pemprov DKI menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 dengan kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif.

Pemotongan kilat

Pada Rabu, rapat Badan Anggaran DPRD DKI sebelum pengesahan KUA-PPAS berjalan begitu kilat. Sekitar 4 jam, rapat bisa memangkas kelebihan pengeluaran Rp 10 triliun. Saat itu, pos pengeluaran lebih besar Rp 10 triliun dari asumsi pendapatan DKI 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.

Rapat yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI itu hanya memperlihatkan sejumlah pos anggaran besar, seperti pos pendapatan, pos belanja modal, belanja tak langsung, dan belanja langsung. Pos yang dibahas secara rinci hanya pada penyertaan modal daerah

(PMD), subsidi, dan pinjaman daerah.

Pemotongan pada PMD PT Jakarta Propertindo untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki sekitar Rp 400 miliar, subsidi transportasi (*public service obligation*) sekitar Rp 1,1 triliun, dan fasilitas pinjaman perumahan yang dipotong sekitar Rp 500 miliar.

Jumlah pemotongan yang dibahas terbuka itu hanya Rp 2 triliun atau sangat kecil dibandingkan dengan pemotongan total Rp 10 triliun. Sekitar Rp 8 triliun anggaran lain yang dipotong tidak dibahas terbuka.

Menjelang rapat Badan Anggaran untuk pemotongan anggaran itu, terlihat beberapa rapat tertutup diadakan di Gedung DPRD.

Pemotongan anggaran yang begitu kilat ini juga dinilai berpotensi memperbesar peluang lolosnya anggaran tak wajar. Sebelumnya ditemukan mata anggaran tidak wajar untuk pengadaan lem, pulpen, hingga *influenca* senilai puluhan miliar rupiah. Anggaran yang tidak wajar itu selanjutnya dihapus.

Prasetyo mengatakan, sejumlah pos dipotong demi efisiensi anggaran.

Ia juga meminta Badan Pajak dan Retribusi Daerah lebih giat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dari total pagu Rp 87,9 triliun, Rp 57,561 triliun bersumber dari PAD. Target PAD itu meningkat sekitar Rp 7 triliun dari target PAD 2019 sebesar Rp 50,845 triliun.

Menurut dia, ada sejumlah pajak yang bisa ditingkatkan sehingga mendongkrak pendapatan, seperti pajak parkir dan pajak lampu jalan. (IRE/BOW)